

***FACTORS AFFECTING THE TENDENCY OF ACCOUNTING FRAUDS IN VILLAGE FINANCIAL
MANAGEMENT IN KECAMATAN PELEPAT ILIR BUNGO DISTRICT***

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KECENDERUNGAN *FRAUD* DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DI DESA SE-KECAMATAN PELEPAT ILIR
KABUPATEN BUNGO**

Oleh:

Eri Noprianto¹⁾, Sri Rahayu²⁾, Yudi³⁾

¹⁾*Alumni Magister Ilmu Akuntansi Pascasarjana Universitas Jambi Tahun 2020*

^{2&3)}*Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi*

Email: nopriantoeri@gmail.com¹⁾, srijambi@gmail.com²⁾, yudi_fe@unja.ac.id³⁾

ABSTRACT

This study aimed to determine and analyze the effect of compensation suitability, internal control effectiveness, competence, organizational ethical culture, and individual morality on the tendency of accounting fraud in village financial management in Pelepat Ilir Subdistrict, Bungo Regency. The population of this research were all members of BPD in Pelepat Ilir Subdistrict, Bungo Regency that were divided into 17 hamlets totaling 105 people. Sampling in this study using a saturated sampling technique where all members of the population were used as research samples. Data analysis in this study used the Partial Least Square (PLS) approach. The results of this study indicated that the suitability of compensation, the effectiveness of internal controls, organizational ethical culture, competence, and individual morality had significant effects on the tendency of accounting fraud in village financial management.

Key words: The tendency of accounting fraud, suitability of compensation, effectiveness of internal control, organizational ethical culture, competence, and individual morality.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesesuaian kompensasi, efektivitas pengendalian internal, kompetensi, budaya etis organisasi, dan moralitas individu terhadap kecenderungan fraud akuntansi dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo. Populasi penelitian ini adalah seluruh anggota BPD di Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo yang terbagi menjadi 17 dusun sebanyak 105 orang. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampel jenuh dimana semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Partial Least Square* (PLS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi, efektivitas pengendalian internal, budaya etis organisasi, kompetensi, dan moralitas individu berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan *fraud* akuntansi dalam pengelolaan keuangan desa.

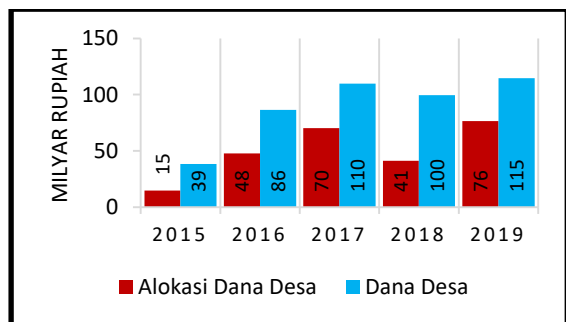
Kata kunci: Kecenderungan *fraud* akuntansi, kesesuaian kompensasi, efektivitas pengendalian internal, budaya etis organisasi, kompetensi, dan moralitas individu.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah menjadikan desa sebagai prioritas dalam mewujudkan pembangunan, sehingga desa-desa yang berkembang di Indonesia membantu pada kemajuan bangsa. Untuk mengimplementasikan Undang-Undang tentang Desa, pemerintah mendukung dalam bentuk penyaluran dana desa yang bertujuan untuk membiayai pembangunan. Dalam Peraturan Menteri Nomor 16 tahun 2018 Pasal 1 ayat 2, mengatakan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah, melaksanakan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, Alokasi Dana Desa adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari hasil bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional (Permendes, 2018)..

Sumber penerimaan desa yang berasal dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tergolong sangat besar. Untuk Kabupaten Bungo, penerimaan yang berasal dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa mencapai angka ratusan milyar rupiah dan nilainya semakin meningkat setiap tahunnya. Dana Desa pada tahun 2015 di Kabupaten Bungo sebesar Rp.14.663.781.000,00, meningkat menjadi Rp.76.490.889.800,00 pada tahun 2019. Sementara itu, Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten Bungo pada tahun 2015 sebesar Rp.38.514.584.000,00 dan juga meningkat menjadi Rp.114.476.496.000,00 pada tahun 2019. Lebih lengkapnya perkembangan dana desa dan alokasi dana desa yang menjadi sumber penerimaan desa di Kabupaten Bungo dapat dilihat dari grafik berikut ini:



Sumber: Dinas PMD Kabupaten Bungo, 2020

Gambar 1.

Perkembangan Sumber Penerimaan Desa Yang Berasal dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bungo Tahun 2015 – 2019

Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memiliki konsekuensi terhadap terjadinya korupsi anggaran desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia No. 113 tahun 2014 sebagai turunan dari UU 6 tahun 2014 yang

mengatur mekanisme pengelolaan keuangan desa memberikan kewenangan dan kekuasaan yang besar kepada kepala desa dalam mengelola keuangan desa (Subiantoro & Pituringsih, 2018). Akibatnya, kasus korupsi anggaran desa tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia.

Indonesia Corruption Watch (ICW) telah melakukan pemantauan atas korupsi yang terjadi di desa. Hasil pemantauan ICW, pada tahun 2015 – 2017 kasus tindak pidana korupsi di desa semakin meningkat. Pada tahun 2015, kasus korupsi mencapai 17 kasus dan meningkat menjadi 41 kasus pada tahun 2016. Lonjakan lebih dari dua kali lipat kemudian terjadi pada tahun 2017 dengan 96 kasus. Total kasus korupsi yang ditemukan sebanyak 154 kasus (ICW, 2018).

Kecenderungan terjadinya Fraud dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo terlihat dari besarnya jumlah temuan dan aduan masyarakat. Data Inspektorat Daerah Kabupaten Tebo menunjukkan bahwa jumlah temuan dalam proses pemeriksaan keuangan desa di Kecamatan Pelepat Ilir tahun 2015 sebanyak 59 temuan, tahun 2016 sebanyak 135 temuan, tahun 2017 sebanyak 65 temuan, dan tahun 2018 sebanyak 53 temuan. Banyaknya jumlah temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Tebo tersebut mengisyaratkan masih adanya kecenderungan kecurangan (*fraud*) yang dilakukan oleh aparat desa dalam pengelolaan keuangan desa.

Tabel 1.
Jumlah Temuan Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo Tahun 2015 - 2018

No	Tahun	Jumlah Temuan	Jumlah Pengaduan Masyarakat
1	2015	59	1
2	2016	135	1
3	2017	65	1
4	2018	53	0
Jumlah		312	3

Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo, 2020

Peneliti mewawancarai salah satu tokoh masyarakat yang bernama Bapak Muhammad Baijuri selaku ketua BPD Dusun Koto Jayo pada tanggal 12 Agustus 2019, beliau mengatakan bahwa: “Keuangan Desa sangat berpotensi untuk disalahgunakan, terutama pada pembangunan fisik, perangkat desa yang tersandung kasus biasanya terkait dengan proyek fisik desa, adanya kesempatan untuk melakukan kecurangan merupakan faktor utama dalam korupsi pengelolaan keuangan desa. Dalam hal kasus pembakaran Kantor Rio ini adalah kurangnya transparansi Datuk Rio kepada masyarakat mengenai pengelolaan keuangan desa. Komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat harus dibangun dengan baik agar kejadian serupa tidak terulang lagi.

Keuangan Desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan disiplin anggaran (Sujarweni, 2015). Pemerintah desa wajib menyusun laporan realisasi dari pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Laporan-laporan tersebut dihasilkan dari siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahap perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan penatausahaan; sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa mempunyai risiko yang cukup tinggi di dalam pengelolaannya, khususnya bagi aparatur pemerintah desa. Fenomena para pejabat daerah yang tersangkut kasus hukum jangan sampai terulang kembali pada skala pemerintah desa. Oleh karena itu, pemerintah desa harus menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya dimana seluruh akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan (Wijaya, 2018).

Penelitian ini menggunakan teori *fraud pentagon* yang dikemukakan oleh (Sorunke & Abayomi, 2016) yang merupakan pembaharuan dari dua teori sebelumnya yaitu teori *fraud triangle* dan *fraud diamond*. Ada lima elemen di dalam teori *fraud pentagon* yang menjadi motivasi seseorang untuk melakukan kecurangan, yaitu; (1) adanya tekanan/dorongan (*pressure/motivation*); (2) adanya pembenaran (*rationalization*); (3) adanya peluang/kesempatan (*opportunity*); (4) adanya kemampuan (*capability*); dan (5) etika pribadi (*personal ethics*). Sorunke & Abayomi (2016) menyatakan bahwa etika pribadi merupakan faktor kunci dalam motivasi pelaku penipuan dan dapat mengintegrasikan etika pribadi sebagai variabel baru ke dalam model teori sebelumnya, sehingga dapat menjembatani kesenjangan dalam model yang ada sebelumnya.

1.2. Rumusan Masalah

- 1) Apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud*?
- 2) Apakah efektivitas pengendalian intern berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud*?
- 3) Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud*?
- 4) Apakah budaya etis organisasi berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud*?
- 5) Apakah moralitas individu berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud*?

1.3. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan *fraud* akuntansi.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh efektivitas pengendalian terhadap kecenderungan *fraud* akuntansi.

- 3) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kecenderungan *fraud* akuntansi.
- 4) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh budaya etis organisasi terhadap kecenderungan *fraud* akuntansi.
- 5) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh moralitas individu terhadap kecenderungan *fraud* akuntansi.

2. KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1. *Fraud*

Kecenderungan *fraud* akuntansi adalah salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan dan kesalahan yang ditimbulkan karena adanya perlakuan yang tidak wajar terhadap aktiva terkait pencurian yang mengakibatkan laporan keuangan disajikan tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang umumnya berlaku di Indonesia. Pengukuran kecenderungan kecurangan akuntansi berdasarkan indikator yang dikembangkan oleh Kuntari et al., (2017) yang diukur dengan dengan 5 indikator yaitu: (1) Manipulasi, perubahan catatan akuntansi dan dokumen pendukungnya, (2) Menghilangkan peristiwa, transaksi, atau informasi yang signifikan dari laporan keuangan, (3) Salah penerapan prinsip akuntansi secara sengaja, (4) Penyajian laporan keuangan yang salah akibat pencurian (penyalahgunaan/penggelapan), (5) Penyajian laporan keuangan yang salah akibat perlakuan yang tidak semestinya terhadap aktiva dan catatan atau dokumen palsu.

2.1.1. *Fraud Triangle*

Teori fraud triangle yang dikemukakan oleh Donald R. Cressey pada tahun 1953 yang menjelaskan bahwa penyebab utama individu melakukan kecurangan didasarkan pada tiga unsur utama yaitu, tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi (Tehupuring & Lingga, 2017). Ketiga faktor ini kemudian dikenal sebagai teori *fraud triangle*. Tiga unsur tersebut merupakan model paling populer untuk menjelaskan sifat penipuan. Sehingga unsur penipuan tersebut masuk dalam standar audit profesional di seluruh dunia termasuk standar audit internasional (Vassiljev & Alver, 2016). Teori *Fraud Triangle* memiliki 3 komponen, yaitu tekanan, peluang, dan rasionalisasi.

2.1.2. *Fraud Diamond*

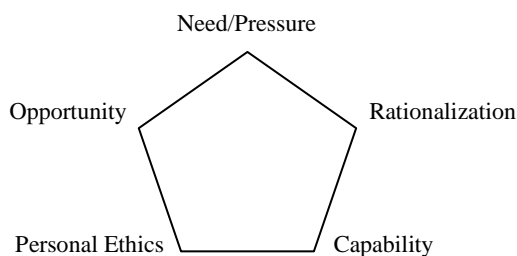
Wolfe & Hermanson (2004) berpendapat bahwa *fraud triangle* dapat diperpanjang dengan menambahkan elemen keempat yaitu elemen kemampuan (*capability*) yang selanjutnya dikenal dengan teori *fraud diamond*. Kemampuan yang melekat pada pelaku dapat berupa posisi dan pengetahuan yang memadai. Menurut (Dorminey et al., 2012) elemen kesempatan (*opportunity*) dalam teori *fraud triangle* dapat membuka celah untuk melakukan kecurangan. Elemen tekanan, dan rasionalisasi dapat membuat pelaku lebih dekat lagi untuk melakukan kecurangan, tetapi pelaku

harus memiliki kemampuan untuk menyadari adanya kesempatan sehingga dapat melakukan tindakan curang. Pelaku *fraud* juga memiliki sifat dan kemampuan yang diperlukan untuk menjadi orang yang tepat untuk melakukan kecurangan. Orang ini telah mengenali peluang untuk melakukan aksi kecurangannya sehingga ia berhasil melakukannya (Ruankaew, 2016).

2.1.3. *Fraud Pentagon*

Sorunke & Abayomi (2016) menjelaskan bahwa etika pribadi merupakan faktor pendorong utama dalam keinginan penipu untuk melakukan penipuan. Secara khusus, survei ini mengungkapkan bahwa seorang individu dengan etika pribadi yang tinggi kemungkinan tidak akan melakukan penipuan bahkan ketika membutuhkan ataupun di bawah tekanan. Padahal, perlu atau tidak perlu, orang dengan etika pribadi rendah cenderung akan melakukan penipuan. Gbegi & Adebisi (2013) juga menyarankan agar skala penipuan memasukkan elemen integritas pribadi dalam model penipuan.

Etika pribadi dalam pengertian ini didefinisikan dalam hal komitmen individu terhadap kehidupan moral yang bertentangan dengan amoralisme. Moralitas individu yang baik akan mencegah pribadi melakukan kecurangan walaupun dengan tekanan seberat apapun. Hal tersebut terjadi karena jika seorang individu tertanam moralitas yang baik dan memiliki nilai dan norma yang baik pula maka dia akan cenderung menghindari pelanggaran peraturan (Nashruah & Wijayanti, 2019). Sorunke & Abayomi (2016) menyatakan bahwa etika pribadi merupakan faktor kunci dalam motivasi pelaku penipuan dan dapat mengintegrasikan etika pribadi sebagai variabel baru ke dalam model sebelumnya, sehingga dapat menjembatani kesenjangan dalam model yang ada sebelumnya. Model penipuan baru ini disebut dengan *fraud pentagon theory* yang terdiri dari; Tekanan (*Need/Pressure*), Peluang (*Opportunity*), Rasionalisasi (*Rationalization*), Kemampuan (*Capability*), dan Etika Pribadi (*Personal Ethics*).



Sumber: Sorunke and Aboyami (2016)

Gambar 2.
The Fraud Pentagon

2.2. **Kesesuaian Kompensasi**

Kesesuaian kompensasi menjadi *proxy* dari elemen tekanan (*incentive/pressure*). Kompensasi adalah salah

satu motivasi seseorang dalam melakukan pekerjaan sehingga ia tergerak untuk mendapatkan kompensasi (Suwatno & Priansa, 2016). Pengukuran variabel kesesuaian kompensasi dalam penelitian ini menggunakan 6 item pertanyaan yang dikembangkan oleh Oktavia (2018) dan sudah disesuaikan dengan kondisi pemerintahan desa. Indikator yang digunakan diantaranya: (1) kompensasi keuangan, (2) pengakuan instansi atas keberhasilan dalam melaksanakan pekerjaan, (3) promosi, (4) penyelesaian tugas, (5) pencapaian sasaran, dan (6) pengembangan pribadi.

2.3. **Efektivitas Pengendalian Internal**

Efektivitas pengendalian internal adalah proses untuk mencapai keandalan laporan keuangan, kepatuhan hukum, dan alat untuk mengendalikan organisasi agar beroperasi agar lebih efektif dan efisien (Rusdi & Kumalasari, 2015). Efektivitas pengendalian internal dalam penelitian ini adalah sebagai *proxy* dari elemen *opportunity*. PP no. 60 2008 tentang sistem pengendalian intern dilingkungan pemerintahan mencakup unsur, (1) lingkungan pengendalian, (2) penilaian risiko (3) kegiatan pengendalian, (4) informasi dan komunikasi (5) pemantauan.

2.4. **Budaya Etis Organisasi**

Robbins & Judge (2014) menjelaskan bahwa budaya etis organisasi merupakan suatu persepsi bersama yang dianut oleh anggota organisasi tersebut, sehingga persepsi tersebut menjadi suatu sistem dan makna bersama bagi anggota organisasi tersebut. Budaya etis organisasi merupakan *proxy* dari elemen *rationalization* yang diukur dengan indikator sebagai berikut; (1) model peran yang visible, (2) komunikasi harapan etis, (3) pelatihan etis, (4) hukuman bagi tindakan etis (5) mekanisme perlindungan etik.

2.5. **Kompetensi**

Kompetensi menjadi *proxy* dari elemen *diamond fraud* yakni *capability* (kemampuan). Kompetensi merupakan karakteristik dasar seseorang yang mengindikasikan cara berpikir, bersikap, dan bertindak serta menarik kesimpulan yang dapat dilakukan dan dipertahankan oleh seseorang pada waktu periode tertentu. Pengukuran kompetensi mengacu pada indikator dalam penelitian Oktavia (2018) yang terdiri dari: 1) pemahaman terhadap cara kerja, prosedur kerja, proses kerja, 2) pemahaman terhadap rencana dan target kerja, 3) pemahaman proses kerja pada bagian lain, 4) pemahaman/ kemampuan tentang situasi dan permasalahan organisasi, 5) kemampuan penyesuaian diri, pengendalian diri dan bekerja sama, 6) kemampuan dalam menyampaikan gagasan dan pokok pikiran, dan 7) penguasaan terhadap peralatan dan teknologi informasi.

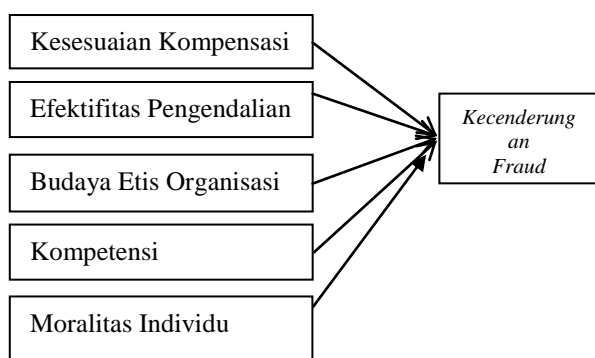
2.6. **Moralitas Individu**

Seseorang cenderung melakukan penipuan karena faktor kebutuhan dan keserakahan. Seseorang yang memiliki keinginan dan kebutuhan tidak pernah puas dengan kekayaan yang dimiliki serta rakus dan perilaku

serakah akan cenderung memiliki peluang untuk melakukan penipuan. semakin baik moralitas aparatur maka kecenderungan melakukan kecurangan akuntansi semakin kecil (Kuntari et al., 2017). Moralitas individu yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sikap dan perilaku responden yang ditunjukkan atau dimiliki dalam menghadapi tugas pekerjaan. Moralitas aparat diukur oleh 6 (enam) indikator yang diadopsi dari penelitian yang dikembangkan oleh Okura (2013) yaitu: (1) Laporan keuangan disajikan dengan akurat, (2) Tidak menerima penyuapan dalam bentuk apapun, (3) Loyalitas terhadap pekerjaan, (4) Standar penyusunan laporan keuangan, (5) Konservatisme (Kehati-hatian).

2.7. Model Penelitian

Adapun model dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Sumber: diolah sendiri, 2019

Gambar 3.
Model Penelitian

2.8. Hipotesis

- H1: Kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap *fraud*.
- H2: Efektifitas pengendalian internal berpengaruh terhadap *fraud*
- H3: Budaya etis organisasi berpengaruh terhadap *fraud*
- H4: Kompetensi berpengaruh terhadap *fraud*
- H5: Moralitas individu berpengaruh terhadap *fraud*

3. METODE PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua semua anggota BPD se-kecamatan pelepat ilir yang berjumlah 105 orang. Penelitian ini menggunakan teknik sampel jenuh dimana semua populasi dijadikan sebagai sampel.

3.2. Alat Pengumpul Data

Peneliti menggunakan kuesioner dengan skala likert dalam mengumpulkan data. Pertanyaan yang diajukan dengan menggunakan 5 alternatif jawaban, yaitu; Selalu (SL), Sering (SR), Kadang-Kadang (KK), Jarang (JR),

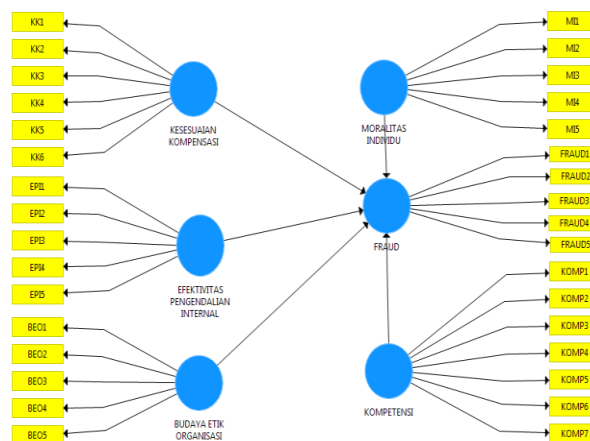
dan Tidak Pernah (TP). Khusus untuk kuesioner kecenderungan *fraud* digunakan pernyataan negatif sehingga semakin besar nilai jawaban kuesioner menunjukkan semakin rendahnya kemungkinan terjadinya *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa.

3.3. Metode Analisis

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Partial Least Square* (PLS). PLS adalah model persamaan *Structural Equation Modeling* (SEM) yang berbasis komponen atau varian.

3.3.1. Struktur Analisis Model

Analisis data menggunakan metode *Partial Least Square* pada model *Structure Equation Modeling* (SEM) dilakukan dengan dua langkah. Langkah pertama yaitu pengujian *outer model* untuk melihat kemampuan setiap indikator untuk mengukur variabel latennya masing-masing. Langkah kedua yaitu pengujian *inner model* yaitu untuk menguji hubungan antar variabel laten. Berdasarkan gambaran tersebut, maka struktur model analisis dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Hasil olahan, 2020

Gambar 4.
Struktur Model Analisis

3.3.2. Pengujian Outer Model/Measurement Model

Pengujian *outer model* atau pengukuran model (*measurement model*) dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan dari penggunaan instrumen penelitian (Ghozali & Laten, 2012). *Outer Model* dapat dilakukan dengan pengujian sebagai berikut:

- 1) Uji *Cronbach's alpha* dan *Composite reliability*

Suatu konstruk dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach's alpha* harus lebih dari 0,6 dan nilai *composite reliability* harus lebih dari 0,7.

- 2) Validasi Konvergen

Rule of thumb yang digunakan untuk validasi konvergen adalah *outer loading* > 0,7, *communality* > 0,5 dan *AVE* > 0,5 (Abdillah & Jogiyanto, 2015).

3) Validitas Diskriminan
Validitas *discriminant* diuji dengan metode *Fornell-Larcker*. Metode *Fornell-Larcker* dapat dilakukan dengan membandingkan *square roots* atas AVE dengan korelasi partikel laten. Variabel *discriminant* dikatakan apabila *square roots* atas AVE sepanjang garis diagonal lebih besar dari korelasi antara satu konstruk dengan yang lainnya.

3.3.3. Pengujian *Inner Model*

Pengujian *inner model* dilakukan untuk melihat hubungan struktural antar variabel laten yang diteliti. Langkah-langkah pengujian *inner model* adalah;

1) Pengujian Hipotesis

Untuk pengujian hipotesis atas pengaruh dilakukan dengan melakukan perbandingan antara hasil *path coefficient* dengan t_{tabel} . Hipotesis dapat dikatakan sangat signifikan apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai p-value lebih kecil dari taraf signifikansi $\alpha = 0,05$.

2) Koefisien Diterminasi (R^2)

Hasil $R^2 = 0,67$ menunjukkan kekuatan model kuat; $R^2 = 0,33$ menunjukkan kekuatan moderat dan $R^2 = 0,19$ menunjukkan kekuatan lemah atau kurang.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Statistik Deskriptif

Kuesioner yang disebarakan dalam penelitian ini sebanyak 105 lembar. Dari jumlah tersebut, sebanyak 94 kuesioner (89,52%) layak untuk dianalisis dan bisa dilanjutkan ke tahapan analisis data dan 11 kuesioner lainnya tidak bisa digunakan karena jawaban yang tidak lengkap. Deskripsi data variabel penelitian dilihat dari sebaran jawaban kuesioner setiap variabel penelitian dan persentase skor serta rata-rata persentase skor seluruh item pertanyaan. Deskripsi data variabel penelitian dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.
Deskripsi Jawaban Responden

Variabel	Skor	%	Kriteria
X1	2353	83.44	Tinggi
X2	1847	78.60	Tinggi
X3	1845	78.51	Tinggi
X4	2631	79.97	Tinggi
X5	1909	81.23	Tinggi
Y	885	37.66	Rendah

Sumber : Data hasil olahan, 2020

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat jawaban responden dengan variabel X1,X2,X3,X4, dan X5 berapada pada kriteria tinggi, sedangkan variabel Y berada pada kriteria rendah.

4.2. Pengujian *Outer Model*

4.2.1 Uji *Composite* dan *Cronbach Alpha*

Pengujian reliabilitas dilakukan untuk melihat keandalan semua indikator untuk mengukur suatu konstruk. Konstruk dikatakan reliabel jika memiliki nilai *composite reliability* dan *cronbach alpha* yang tinggi. Nilai yang disarankan untuk nilai *composite reliability* jika lebih besar dari 0,7 dan nilai *cronbach alpha* lebih besar dari 0,6. Nilai *composite reliability* dan *cronbach alpha* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.
Nilai *Cronbach Alpha* dan *Composite Reliability*

Variabel Laten	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Composite Reliability</i>
BEO	0.852	0.894
EPI	0.816	0.872
FRAUD	0.890	0.919
KK	0.889	0.916
KOMP	0.891	0.914
MI	0.861	0.900

Sumber; Hasil olah data, 2020

Berdasarkan tabel. 4 dapat dilihat bahwa nilai *composite reliability* pada semua variabel lebih besar dari 0,7. Hal ini berarti bahwa hasil pengukuran pada setiap konstruk reliabel dan mampu menjelaskan dengan baik masing-masing variabel dimaksud. Nilai *cronbach alpha* pada semua variabel lebih besar dari 0,6 yang berarti bahwa semua konstruk reliabel dan data hasil pengukuran semua indikator untuk mengukur variabel laten dapat diandalkan.

4.2.2. Uji Validitas Konvergen

Hasil pengukuran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.
Hasil Pengukuran *Average Variance Extracted*

Variabel Laten	AVE
BEO	0.629
EPI	0.577
FRAUD	0.695
KK	0.645
KOMP	0.604
MI	0.642

Sumber: Hasil pengolahan data, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai AVE pada masing-masing variabel laten lebih besar dari 0,5, yang berarti bahwa semua indikator pada masing-masing variabel laten mampu mengukur dengan baik variabel latennya.

4.2.3. Uji Validitas *Discriminant*

Pengukuran validitas *discriminant* dilakukan menggunakan metode *Fornell-Larcker*, engan membandingkan *square roots* atas AVE dengan korelasi partikel laten. Hasil pengujiannya sebagai berikut:

Tabel 6.
Fornell Larckel Criterion

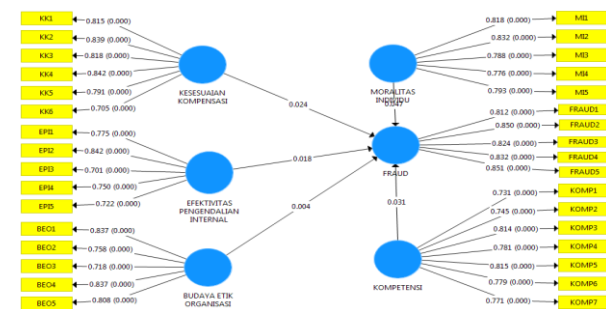
	KK	EPI	BEO	KOMP	MI	FRAUD
KK	0.803					

EPI	0.669	0.759				
BEO	0.710	0.757	0.793			
KOMP	0.568	0.652	0.716	0.777		
MI	0.759	0.749	0.742	0.766	0.802	
FRAUD	0.750	0.785	0.809	0.754	0.820	0.834

Sumber: Hasil pengolahan data, 2020

Berdasarkan tabel 6 dapat dilihat bahwa nilai akar kuadrat dari AVE sepanjang garis diagonal lebih besar dari korelasi antara satu konstruk dengan yang konstruk yang lain. Hal ini berarti bahwa pengukuran variabel laten memenuhi validitas diskriminan menggunakan metode *Fornell Larckel Criterion*.

Secara keseluruhan hasil analisis data dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Hasil olah data, 2020

Gambar 5.
Hasil Pengujian Model

4.2. Pengujian *inner model*

Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh kesesuaian kompensasi, efektivitas pengendalian internal, budaya etis organisasi, kompetensi, dan moralitas individu terhadap kecenderungan *fraud*. Hasil penelitian digambarkan sebagai berikut:

4.2.1. Koefisien *path*

Hasil analisis ini untuk melihat besarnya pengaruh kesesuaian kompensasi, efektivitas pengendalian internal, budaya etis organisasi, kompetensi, dan moralitas individu terhadap kecenderungan *fraud* yaitu sebagai berikut:

Tabel 7.
Koefisien Path

Hubungan Antar Variabel Laten	Koefisien
KK -> FRAUD	-0.176
EPI -> FRAUD	-0.208
BEO -> FRAUD	-0.234
KOMP -> FRAUD	-0.187
MI -> FRAUD	-0.215

Sumber: Hasil pengolahan data, 2020

Berdasarkan tabel 7 dapat dirumuskan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan *fraud* dengan koefisien path bernilai negatif sebesar -0,176, yang berarti bahwa setiap peningkatan kesesuaian

kompensasi akan menurunkan kecenderungan *fraud*.

- (2) Pengaruh efektivitas pengendalian internal terhadap kecenderungan *fraud* dengan koefisien path bernilai negatif sebesar -0,208, yang berarti bahwa setiap peningkatan efektivitas pengendalian internal akan menurunkan kecenderungan *fraud*.
- (3) Pengaruh budaya etis organisasi terhadap kecenderungan *fraud* dengan koefisien path bernilai negatif sebesar -0,234, yang berarti bahwa setiap peningkatan budaya etis organisasi akan menurunkan kecenderungan *fraud*.
- (4) Pengaruh kompetensi terhadap kecenderungan *fraud* dengan koefisien path bernilai negatif sebesar -0,187, yang berarti bahwa setiap peningkatan kompetensi perangkat desa akan menurunkan kecenderungan *fraud*.
- (5) Pengaruh moralitas individu terhadap kecenderungan *fraud* dengan koefisien path bernilai negatif sebesar -0,215, yang berarti bahwa setiap peningkatan moralitas individu akan menurunkan kecenderungan *fraud*.

4.2.2. Pengujian hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menguji signifikansi hubungan antar variabel laten penelitian. Kriteria yang digunakan yaitu dengan membandingkan nilai *p-value* hasil pengujian hipotesis dengan taraf signifikansi 0,05. Jika *p-value* ≤ 0,05, maka hipotesis statistik diterima dengan demikian variabel eksogen berarti berpengaruh signifikan terhadap variabel endogennya. Hasil pengujian hipotesis pengaruh langsung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8.
Hasil Pengujian Hipotesis

Hubungan Antar Variabel Laten	T Statistics	P Values
KK -> FRAUD	2.261	0.024
EPI -> FRAUD	2.383	0.018
BEO -> FRAUD	2.857	0.004
KOMP -> FRAUD	2.162	0.031
MI -> FRAUD	1.989	0.047

Sumber: Hasil pengolahan data, 2020

Berdasarkan Tabel 8 dapat dirumuskan hasil pengujian hipotesis sebagai berikut:

- 1) Pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan *fraud* dengan nilai *p-value* sebesar 0,024 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Dengan demikian kesesuaian kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan *fraud*
- 2) Pengaruh efektivitas pengendalian internal terhadap kecenderungan *fraud* dengan nilai *p-value* sebesar 0,018 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Dengan demikian efektivitas pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan *fraud*.
- 3) Pengaruh budaya etis organisasi terhadap kecenderungan *fraud* dengan nilai *p-value* sebesar

0,004 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Dengan demikian budaya etis organisasi berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan *fraud*.

- 4) Pengaruh kompetensi terhadap kecenderungan *fraud* dengan nilai *p-value* sebesar 0,031 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Dengan demikian kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan *fraud*.
- 5) Pengaruh moralitas individu terhadap kecenderungan *fraud* dengan nilai *p-value* sebesar 0,047 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Dengan demikian moralitas individu berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan *fraud*.

4.2.3. R-square

Nilai *R-squared* (R^2) dipergunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel laten eksogen tertentu terhadap variabel laten endogen. Hasil $R^2 = 0,67$ menunjukkan kekuatan model kuat; $R^2 = 0,33$ menunjukkan kekuatan moderat dan $R^2 = 0,19$ menunjukkan kekuatan lemah atau kurang (Ghozali & Laten, 2012).

Tabel 9.
R-square

Variabel Endogen	R Square	R Square Adjusted	Kriteria
FRAUD	0.801	0.790	Kuat

Sumber: Hasil pengolahan data, 2020

Berdasarkan tabel 9 dapat dijelaskan bahwa nilai *R Square* sebesar 0,801. Nilai *R Square* menunjukkan bahwa pengaruh kesesuaian kompensasi, efektivitas pengendalian internal, kompetensi, budaya etis organisasi dan moralitas individu secara bersama-sama terhadap kecenderungan *fraud* tergolong dalam kategori kuat. Sementara itu, nilai *R Square Adjusted* sebesar 0,790 yang berarti bahwa kesesuaian kompensasi, efektivitas pengendalian internal, kompetensi, budaya etis organisasi, dan moralitas individu secara bersama-sama mampu menjelaskan kecenderungan *fraud* sebesar $0,790 \times 100\% = 79,0\%$, dimana sisanya sebesar 21,0% dipengaruhi faktor lain yang tidak termasuk variabel penelitian. Variabel lain yang dapat mempengaruhi kecenderungan *fraud* berdasarkan penelitian (Rusdi & Kumalasari, 2015) adalah asimetri informasi, kepatuhan aturan hukum, dan penegakan hukum.

4.3. Pembahasan

- 1) Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan *fraud* dengan tingkat signifikan 0.024. Sedangkan nilai koefisien path sebesar -0.176 yang berarti menunjukkan arah hubungan negatif. Dengan demikian semakin tinggi variabel kesesuaian kompensasi maka akan dapat menurunkan tingkat kecenderungan *fraud*. Hasil tersebut mendukung hipotesis (H1) yaitu kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud*. Dengan demikian dapat

dimaknai bahwa semakin baik persepsi kesesuaian kompensasi pada perangkat desa maka akan dapat mengurangi tingkat kecenderungan *fraud* dalam pengelolaan keuangan di desa se-kecamatan pelepat ilir. Hal ini juga dapat dilihat dari kontribusi jawaban responden yang menggambarkan tingkat kesesuaian kompensasi di kecamatan pelepat ilir berada dalam kriteria tinggi (baik) sebagaimana disajikan pada tabel 3 sehingga kecenderungan *fraud* di kecamatan pelepat ilir menjadi rendah. Oleh karena itu pemerintah kabupaten bungo agar terus memperhatikan kompensasi dalam bentuk tunjangan kinerja kepada para aparat dusun di dalam kecamatan pelepat ilir sehingga diharapkan dapat menekan terjadinya *fraud* dalam pengelolaan keuangan di pemerintahan desa/dusun.

- 2) Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan *fraud* dengan tingkat signifikan 0.018. Sedangkan nilai koefisien path sebesar -0.208 yang berarti menunjukkan arah hubungan negatif. Dengan demikian semakin tinggi variabel efektivitas pengendalian internal maka akan dapat menurunkan tingkat kecenderungan *fraud*. Hasil tersebut mendukung hipotesis (H2) yaitu efektivitas pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud*. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa semakin baik efektivitas pengendalian internal pada pemerintahan desa di kecamatan pelepat ilir maka akan dapat mengurangi tingkat kecenderungan *fraud* yang akan terjadi. Hal ini juga dapat dilihat dari kontribusi jawaban responden yang menggambarkan tingkat efektivitas pengendalian internal di kecamatan pelepat ilir berada dalam kriteria tinggi (baik) sebagaimana terlihat pada tabel 3 sehingga kecenderungan *fraud* di kecamatan pelepat ilir menjadi rendah. Pengawasan dan bimbingan dari pihak inspektorat kabupaten bungo serta koordinasi yang baik dengan dinas pemerdayaan masyarakat dusun kabupaten bungo serta koordinasi dengan pihak kecamatan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik dalam menjalankan pemerintahan dusun di kecamatan pelepat ilir kabupaten bungo.
- 3) Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa budaya etis organisasi berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan *fraud* dengan tingkat signifikan 0.004. Sedangkan nilai koefisien path sebesar -0.234 yang berarti menunjukkan arah hubungan negatif. Dengan demikian semakin tinggi kesesuaian variabel budaya etis organisasi maka akan dapat menurunkan tingkat kecenderungan *fraud*. Hasil tersebut mendukung hipotesis (H3) yaitu budaya etis organisasi berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud*. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa semakin baik budaya etis organisasi pada perangkat desa

maka akan dapat mengurangi tingkat kecenderungan *fraud* dalam pengelolaan keuangan di desa se-kecamatan pelepat ilir. Hal ini juga dapat dilihat dari kontribusi jawaban responden yang menggambarkan variabel budaya etis organisasi di kecamatan pelepat ilir berada dalam kriteria tinggi (baik) sebagaimana disajikan pada tabel 3 sehingga kecenderungan *fraud* di kecamatan pelepat ilir menjadi rendah. Di dalam lingkungan budaya etis yang baik maka para aparat dusun cenderung mengikuti aturan sehingga dapat menciptakan kondisi kerja yang kondusif dan dapat mencegah terjadinya *fraud*. Budaya etis dalam organisasi dimulai dari pemimpin dalam hal ini Rio (kepala desa) yang sangat berperan besar dalam menciptakan suasana budaya etis di instansinya. Para bawahan akan mengikuti pimpinannya dan mereka cenderung merasionalisasikan perilaku etika yang kurang baik sebagai hal yang biasa. Dengan diterapkannya budaya etis organisasi yang baik maka akan dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan yang beretika sehingga tindakan *fraud* dapat dihindari.

- 4) Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan *fraud* dengan tingkat signifikan 0.031 Sedangkan nilai koefisien path sebesar -0.187 yang berarti menunjukkan arah hubungan negatif. Dengan demikian semakin tinggi variabel kompetensi maka akan dapat menurunkan tingkat kecenderungan *fraud*. Hasil tersebut mendukung hipotesis (*H4*) yaitu kompetensi berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud*. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa semakin baik kompetensi pada pemerintahan desa di kecamatan pelepat ilir maka akan dapat mengurangi tingkat kecenderungan *fraud* yang akan terjadi. Hal ini juga dapat dilihat dari kontribusi jawaban responden yang menggambarkan tingkat kompetensi di kecamatan pelepat ilir berada dalam kriteria tinggi (baik) sebagaimana terlihat pada tabel 3 sehingga kecenderungan *fraud* di kecamatan pelepat ilir menjadi rendah.
- 5) Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa moralitas individu berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan *fraud* dengan tingkat signifikan 0.047. Sedangkan nilai koefisien path sebesar -0.215 yang berarti menunjukkan arah hubungan negatif. Dengan demikian semakin tinggi moralitas individu maka akan dapat menurunkan tingkat kecenderungan *fraud*. Hasil tersebut mendukung hipotesis (*H5*) yaitu moralitas individu berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud*. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa semakin baik moralitas individu pada aparat pemerintah desa di kecamatan pelepat ilir maka akan dapat mengurangi tingkat kecenderungan *fraud* yang akan terjadi. Hal ini juga dapat dilihat dari kontribusi jawaban responden yang menggambarkan tingkat moralitas individu di

kecamatan pelepat ilir yang berada dalam kriteria tinggi (baik) sebagaimana terlihat pada tabel 3 sehingga kecenderungan *fraud* di kecamatan pelepat ilir menjadi rendah. Pemerintahan dusun di kecamatan pelepat ilir dalam mencegah terjadinya *fraud* perlu meningkatkan moralitas individu pada setiap aparat. Dengan moral yang baik setiap individu akan selalu memperhatikan kepentingan yang lebih luas dan universal dari pada kepentingan kelompok tertentu apalagi kepentingan pribadinya. Oleh karena itu dipandang sangat perlu untuk mengembangkan moralitas individu disetiap aparat desa salah satunya dengan cara pendekatan keagamaan seperti menghadiri pengajian atau majelis taklim yang dapat mendekatkan diri kepada tuhan yang maha esa.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan pembahasan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kesesuaian kompensasi berpengaruh negative terhadap kecenderungan *fraud* pada pengelolaan keuangan di desa se-Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo.
- 2) Efektivitas pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud* pada pengelolaan keuangan di desa se-Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo.
- 3) Budaya etis organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud* pada pengelolaan keuangan di desa se-Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo.
- 4) Kompetensi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud* pada pengelolaan keuangan di desa se-Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo.
- 5) Moralitas individu berpengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud* pada pengelolaan keuangan di desa se-Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian ini sebagaimana diuraikan di atas, maka peneliti menyumbangkan saran sebagai berikut:

- 1) Bagi Pemerintah Kabupaten Bungo supaya melakukan evaluasi terhadap efektivitas pengendalian internal desa di Kecamatan Pelepat ilir Kabupaten Bungo yang terbukti mempengaruhi kecenderungan terjadinya *fraud*.
- 2) Bagi Pemerintah Desa di Kecamatan Pelepat Ilir supaya meningkatkan kesesuaian kompensasi bagi perangkat desa yang terbukti berpengaruh terhadap kecenderungan terjadinya *fraud*.
- 3) Bagi Pemerintah Desa di Kecamatan Pelepat Ilir supaya memperbaiki budaya etis organisasi di

desa yang terbukti berpengaruh terhadap kecenderungan terjadinya *fraud*.

- 4) Bagi Pemerintah Desa di Kecamatan Pelepat Ilir supaya meningkatkan kompetensi dan moralitas individu perangkat desa yang terbukti berpengaruh terhadap kecenderungan terjadinya *fraud*.
- 5) Bagi peneliti selanjutnya supaya menggunakan faktor-faktor lainnya sebagai variabel yang mempengaruhi kecenderungan *fraud* seperti kejelasan sasaran anggaran, partisipasi anggaran, ketidakpastian lingkungan, motivasi kerja, etika profesional, dan lain sebagainya.

DAFTAR REFERENSI

- Abdillah, W., & Jogiyanto. (2015). *Partial Least Square (PLS) Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) dalam Penelitian Bisnis*. ANDI.
- Dorminey, J., Scott Fleming, A., Kranacher, M. J., & Riley, R. A. (2012). The evolution of fraud theory. *Issues in Accounting Education*, 27(2), 555–579.
- Gbegi, D. ., & Adebisi, J. . (2013). the New Fraud Diamond Model- How Can It Help Forensic Accountants in Fraud Investigation in Nigeria? *European Journal of Accounting Auditing and Finance Research*, 1(4), 129–138.
- Ghozali, I., & Laten, H. (2012). *Partial Least Squares (PLS), Konsep, Teknik, dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0 Untuk Penelitian Empiris*. Universitas Diponegoro.
- ICW. (2018). *Outlook Dana Desa 2018 Potensi Penyalahgunaan Anggaran Desa di Tahun Politik*.
- Kuntari, I. M., Akram, & Supaman, L. (2017). Determinant and Trends of Fraud of Accounting Fraudulent Towards Financial Accountability. *International Conference and Call for Papers, Jember*, 2354–2377.
- Nashruah, N. U., & Wijayanti, P. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Fraud Akuntansi di Pemerintah Desa. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 8(2), 141–153.
- Oktavia, T. A. (2018). *Determinan Kecurangan Berbasis Diamond Fraud dan Perilaku Tidak Etis Sebagai Variabel Intervening Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Lumajang*. Universitas Jember.
- Okura, M. (2013). The Relationship Between Moral Hazard and Insurance Fraud. *The Jurnal of Risk Finance*, 14(2), 120–128.
- Permendes. (2018). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019*.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2014). *Perilaku Organisasi (Organizational Behavior)* (16th ed.). Salemba Empat.
- Ruankaew, T. (2016). Beyond the Fraud Diamond. *International Journal of Business Management & Economic Research (IJBMER)*, 7(1), 474–476.
- Rusdi, D., & Kumalasari, Z. (2015). Factors Influencing Trends Against Fraud (Fraud): Employee Perceptions of District Kendal. *ICMFE*, 134–143.
- Sorunke, & Abayomi, O. (2016). Personal Ethics and Fraudster Motivation: The Missing Link in Fraud Triangle and Fraud Diamond Theories. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 6(2), 159–165.
- Subiantoro, M. H., & Pituringsih, E. (2018). The Embezzlement Of Village Budget By Apparatus : A Case Study In East Lombok District Of West Nusa Tenggara Province , Indonesia. *Global Journal of Advanced Research*, 1, 17–25.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Desa (Panduan Tata Kelola Keuangan Desa)*. Pustaka Baru Press.
- Suwatno, & Priansa, D. J. (2016). *Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis*. Alfabeta.
- Tehupuring, R., & Lingga, R. A. (2017). Sistem pengendalian Intern Sebagai Prediktor Kecurangan Akuntansi Pada Pemerintah Daerah. Dapatkah Loyalitas Individu Memitigasinya? *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara*, 3(2), 113.
- Vassiljev, M., & Alver, L. (2016). Conception and Periodisation of Fraud Models: Theoretical Review. *5th International Conference on Accounting, Auditing, and Taxation (ICAAT)*, 473–480.
- Wijaya, D. (2018). *Akuntansi Desa*. Gava Media.
- Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The Fraud Diamond: Considering the Four Elements of Fraud. *The CPA Journal*, 74(12), 38–42.